

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat disertai aktivitas di perkotaan sangat berdampak pada sampah yang dihasilkan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya kegiatan aktivitas masyarakat akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah dan dapat menjadi permasalahan jika penyediaan fasilitas persampahan yang tidak optimal (Tampuyak, 2015). Tidak maksimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan dalam pengelolaan persampahan yaitu bisa berdampak negatif bagi lingkungan sekitar, untuk menanggulangi permasalahan ini sangat diperlukan peran pemerintah yang memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengatur sistem pengelolaan sampah dan didukung oleh kepedulian masyarakat (Daq, 2020).

Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan pemilihan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dibagi meliputi pengurangan sampah, daur ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah. Berdasarkan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan dan Pertamanan, Kota Banjarmasin memiliki cara pengelolaan persampahan dengan proses pewadahan untuk mengumpulkan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.

Kota Banjarmasin memiliki sistem pengelolaan dalam penanganan sampah melalui pewadahan dan pengumpulan ditempat pembuangan sampah TPS sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan sampah terpadu. Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) merupakan tempat pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang hingga proses akhir sampah. Kemudian sampah tersebut diangkut ketempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk diproses. Selain dengan membuang ke

tempat pembuangan sampah juga ada program bank sampah di beberapa wilayah Kota Banjarmasin. Bank sampah adalah wadah pengumpulan sampah dari masyarakat yang nantinya akan dipilih sesuai dengan kriteria yang bisa diterima, kemudian bank sampah akan memberikan buku tabungan yang akan menjadi keuntungan bagi masyarakat (Raharjo, 2020).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dengan peningkatan konsumsi dan aktivitas masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume dan jenis sampah yang harus ditangani (Darmawani, 2017)). Menurut pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Apriansyah mengatakan “*Pemko Banjarmasin harus tegas menindak pihak pemulung yang suka mengaduk-aduk sampah di TPS. Semestinya harus ditindak, tak boleh dilakukan di TPS sementara*” (Kumparan.com/banjarhits, 2019). Permasalahan pengelolaan sampah juga dikarenakan adanya pemulung yang mencari sampah dengan cara diobrak-abrik untuk bisa dijual, hal ini membuat sampah semakin terlihat berhamburan hingga sampai kejalan. Dalam *regional.kompas.com* Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin Marzuki, S.E., M.A mengatakan bahwa ada tiga Kecamatan (Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara) yang memiliki masalah persampahan “*wilayah-wilayah itu penduduknya sangat padat, otomatis timbulan sampahnya pasti banyak*” hampir setiap hari 5 sampai 10 truk untuk pengangkutan sampah (Kontributor Banjarmasin, 2021).

Pentingnya melakukan pengelolaan persampahan karena buruknya pengelolaan sampah dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat (Widiastuti, 2017). Salah satu permasalahan yang ditimbulkan akibat dari sampah ialah menurunnya estetika disekitar tempat pembuangan sampah, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada disekitarnya (Mahyudin, 2017). Persoalan akibat dari sampah dapat dapat berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan yang berdampak pada pencemaran lingkungan serta kenyamanan dan keindahan yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial (Bintarto, 1997:57) (Rosmidah Hasibuan, Maret 2016)

Dari gambaran mengenai sistem pengelolaan persampahan Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah maka dirasa perlu melakukan penelitian ini untuk meninjau secara komprehensif dengan seluruh aspek yang luas dan serta data yang lengkap. Data dalam penelitian dapat berupa fakta ataupun angka, serta hasil dalam pengukuran dan observasi untuk mendapatkan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Data mempunyai peran penting dalam penelitian karena memiliki fungsi sebagai alat uji pertanyaan atau hipotesis penelitian dan kualitas data menentukan kualitas dari hasil penelitian (DR. Ridwan, 2009). Dari seluruh data yang dikumpulkan mengenai sistem pengelolaan sampah dan indikator untuk dapat memahami dengan baik dan menyeluruh sehingga diketahui potensi serta permasalahan berdasarkan tinjauan pengelolaan persampahan.

Pendekatan rasional disebut sebagai pendekatan yang komprehensif dengan pengetahuan yang relatif “sempurna” (Rustiadi, 2003). Dalam paradigma perencanaan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dengan pendekatan dibutuhkan data yang memadai dalam tinjauan komprehensif pada pendahuluan dilakukan sebagai langkah awal untuk tercapainya tujuan menyediakan data pengelolaan persampahan secara optimal.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan didapatkan fakta bahwa SOP yang membidangi pengelolaan persampahan belum memiliki data dan dokumen perencanaan yang memadai terkait pengelolaan persampahan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan mendasar sistem pengelolaan pengangkutan sampah di Kota Banjarmasin ialah terkait dengan jadwal serta proses pengangkutan sampah. Oleh karena itu perumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dengan berbagai macam aktifitas sehingga berpengaruh pada peningkatan volume sampah yang menimbulkan permasalahan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik (Darmawani, 2017)

2. Jumlah sampah tidak sebanding dengan wadah penampungan sementara atau TPS sehingga penumpukan sampah ke jalan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan lalu lintas di jalan (Yurady, 2019).
3. Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu wilayah padat dengan timbulan sampah yang banyak dan kondisi TPS tidak bisa menampung volume sampah, sehingga proses pengelolaan sampah disana harus melakukan beberapa kali pengangkutan sampah 5 sampai 10 truk/hari oleh petugas kebersihan (Kontributor Banjarmasin, 2021)
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan waktunya dan tidak pada tempatnya atau ke sungai (Syafari, 2015).
5. Sampah konsumsi masyarakat perkotaan ternyata banyak yang tidak mudah terurai seperti plastik dan penumpukan sampah menimbulkan pencemaran serius (Raharjo, Analisis Perencanaan Kebutuhan Operasional Bank Sampah Induk Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Bank Sampah Unit di Kota Banjarmasin, 2020)
6. Ada 3 TPS di Kecamatan Banjarmasin ditutup karena Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Dinas Lingkungan Hidup merasa tempat pembuangan sampah sementara berdekatan dengan sungai dan mengganggu lalu lintas. Sehingga kabid kebersihan dan pengelolaan sampah DLH Banjarmasin mengatakan 3 TPS yang ditutup berada di titik Jalan Pramuka, di samping Komplek DPRD dan di depan Komplek Rahayu. Kemudian di Jalan Veteran yakni simpang 3 Sungai Gardu (Ramadhan, 2021).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah adapun pertanyaan penelitian ialah bagaimana pengelolaan persampahan di Kecamatan Banjarmasin Timur?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dalam penelitian tugas akhir ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara komprehensif pengelolaan persampahan di Kecamatan Banjarmasin Timur.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dalam penelitian tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Manfaat dalam penelitian ini bagi pemerintah Kota Banjarmasin dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upaya perbaikan pengelolaan persampahan di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur.

### **2. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah sebagai salah satu bagian usaha dalam meningkatkan aspek pengelolaan sarana persampahan sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

### **3. Bagi Dunia Akademis**

Manfaat dalam penelitian ini bagi dunia akademis sebagai khazanah keilmuan terhadap sistem pengelolaan persampahan serta menjadi referensi dalam sumber literature dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Berdasarkan data awal yang didapat terhadap 3 Kecamatan, peneliti memilih Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai lokasi penelitian untuk melaksanakan tinjauan komprehensif karena sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu untuk penelitian,
2. Biaya,
3. Tenaga, dan
4. Adanya penutupan 3 (tiga) TPS dan tidak ada TPS pengganti.



### **1.6.2 Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian didapatkan melalui triangulasi sumber terhadap literatur-literatur yang membahas pada fokus sistem pengelolaan persampahan yang meliputi kependudukan, partisipasi masyarakat, sistem pengelolaan persampahan, ketersediaan sumberdaya, nilai ekonomi sampah, dan kebijakan undang-undang pengelolaan persampahan. Ruang lingkup substansi ini dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Triangulasi antarpeleliti Sistem Pengelolaan Sampah

Aspek Tinjauan	<i>Implementation analysis of solid waste management in Ludhiana city of Punjab</i> (Mir, 2021)	Analisis Sistem Persampahan di Kota Tenate (Akbar, 2014)	Penyusunan Indeks Tingkat Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah Kota (Rumakat, 2021)	Pengelolaan Sampah (Damanhuri, 2010)	Manajemen Program Pengelolaan Sampah di Bening Saguling (Fitriana, 2019)	Evaluasi Pengelolaan Sampah kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu (Tato S. , 2015)	Pembahasan	Tinjauan Peneliti
<b>KEPENDUDUKAN</b>	-	Kepadatan dan Penyebaran Penduduk yang menjadi salah faktor dalam timbulan sampah.	-	Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat.	-	-	Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berdampak pada jumlah sampah yang juga meningkat.	- jumlah penduduk - kepadatan penduduk - proyeksi penduduk
<b>PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Shukor et al. (2011) menyatakan bahwa setidaknya masyarakat berpartisipasi untuk melakukan pembuangan sampah yang benar serta dapat memisahkan jenis sampah. Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan sampah( Hasan, 2004 ). Beberapa peneliti sangat setuju bahwa ketidakpahaman masyarakat akan pengelolaan sampah adalah faktor penting yang memutuskan strategipengelolaan sampah di daerah	Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan ialah budaya sikap dan perilaku masyarakat. Kondisi dilapangan diperburuk oleh sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang cara membuang sampah secara baik dan benar.	Ikut serta membantu dalam pengelolaan sampah dengan bersedia membayar pengelolaan sampah	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah:  - pemboasaan - perubahan persepsi  Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat Kesadaran masyarakat akan tertib sesuai dengan aturan untuk mengelola sampah	kesadaran masyarakat tentang proses pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara pendekatan berbasis keluarga, sehingga mulai dari lingkungan keluarga	Masyarakat dapat mengambil peran untuk pengambilan keputusan maupun perumusan suatu kebijakan karena dapat berpengaruh pada keberhasilan suatu program pembangunan.  - Melakukan berbagai kegiatan seperti gotong royong, kerjabakti - Hanya membersihkan lahan sendiri	Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan sampah agar dapat membantu petugas kebersihan serta terimplementasinya peraturan tentang pengelolaan sampah. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pengelolaan sampah adalah salah satu faktor dalam sistem pengelolaan sampah yang baik, dengan pemahaman masyarakat tentang pengolahan dan pembuangan sampah serta mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku	- Sistem pengelolaan persampahan di permukiman dan perumahan - Bentuk partisipasi masyarakat - Kerjasama antar masyarakat dan instansi atau lembaga pengelolaan persampahan

Aspek Tinjauan	<i>Implementation analysis of solid waste management in Ludhiana city of Punjab</i> (Mir, 2021)	Analisis Sistem Persampahan di Kota Tenate (Akbar, 2014)	Penyusunan Indeks Tingkat Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah Kota (Rumakat, 2021)	Pengelolaan Sampah (Damanhuri, 2010)	Manajemen Program Pengelolaan Sampah di Bening Saguling (Fitriana, 2019)	Evaluasi Pengelolaan Sampah kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu (Tato S. , 2015)	Pembahasan	Tinjauan Peneliti
	mana pun (Desa et al., 2011 ).							
<b>KETERSEDIAAN SUMBERDAYA</b>	Sumber daya yang memadai tersedia dengan pemerintah menyediakan fasilitas untuk pengumpulan dan pemisahan sampah ( Eriksson et al., 2005 ). "Pelayanan peralatan pengumpulan limbah padat yang tidak memadai, sera kurangnya infrastruktur dan pendanaan yang tepat secara kolektif maka akan mengurangi optimalisasi layanan pembuangan limbah padat ( Vergara dan Tchobanoglous, 2012).	Sebagai sarana pengumpulan sampah, TPS seringkali menjadi permasalahan bagi warga karena menolak lokasi yang disediakan.  Banyak TPS yang dibangun dinas Kebersihan Kota Ternate malah dibongkar warga.  Kondisi TPS yang tidak berpenutup juga merupakan sumber bau busuk dan vector penyakit dari lalat dan tikus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peadahan</li> <li>- Pengumpulan sampah</li> <li>- Pengangkutan</li> <li>- Tempat pembuangan akhir</li> <li>- Upaya minimasi sampah</li> </ul>	Menurut UU-18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan sampah (<i>waste minimization</i>),</li> <li>- Penanganan sampah (<i>waste handling</i>)</li> </ul>			Tersedianya fasilitas pelayanan persampahan sangat penting dalam bagian pengelolaan sampah. Jumlah volume sampai juga harus seimbang dengan peadahan tempat pengumpulan sampah. Selain tempat pembuangan sampah, petugas kebersihan juga perlu diperhatikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan fasilitas pelayanan pengelolaan persampahan</li> <li>- Sumberday amanusia yaitu Petugas kebersihan</li> </ul>
<b>PENGLOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Mencakup perencanaan dan eksekusi berkelanjutan dari semua tenda con-	Pengelolaan persampahan, terdiri dari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan sampah</li> </ul>	Teknik operasional pengelolaan sampah kota meliputi dasar-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peadahan</li> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengangkutan</li> </ul>	Rencana pengelolaan sampah merupakan suatu upaya dalam mengatasi	

Aspek Tinjauan	<i>Implementation analysis of solid waste management in Ludhiana city of Punjab</i> (Mir, 2021)	Analisis Sistem Persampahan di Kota Tenate (Akbar, 2014)	Penyusunan Indeks Tingkat Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah Kota (Rumakat, 2021)	Pengelolaan Sampah (Damanhuri, 2010)	Manajemen Program Pengelolaan Sampah di Bening Saguling (Fitriana, 2019)	Evaluasi Pengelolaan Sampah kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu (Tato S. , 2015)	Pembahasan	Tinjauan Peneliti
	rencana pengelolaan sampah yang dapat efektif untuk pengelolaan limbah daerah tersebut. Rencana pengelolaan limbah yang tersedia harus dimasukkan dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pemerintah daerah-ments harus siap untuk mengatasi tantangan yang mungkin 10ating di jalan ( Shekdar, 2009 ). Perencanaan juga harus dimasukkan dengan inovasi.	pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangannya. Pola pengumpulan dilakukan dengan individual langsung dan tidak langsung	- 3 R ( <i>reuse, reduce, recycle</i> )	dasar perencanaan untuk kegiatan: - Pewadahan sampah  - Pengumpulan sampah  - Pemindahan sampah  - Pengangkutan sampah  - Pengolahan sampah  -Pembuangan akhir sampah.		- Aspek pembiayaan/retribusi	permasalahan persampahan, salah satunya dengan adanya program sampah 3R dan bank sampah.	
<b>NILAI EKONOMI DARI SAMPAH</b>	Pengelolaan sampah menghasilkan produksi seperti sampah yang dapat diolah kembali seperti papan, kompos dll. Ketersediaan pasar untuk produk ini diperlukan, sehingga sampah dapat memiliki nilai	salah satu proses pengolahan sampah dilakukan dengan pemusnahan dan pembuatan pupuk kompos sebagai salah satu bentuk nilai ekonomis  sampah dan cukup signifikan mengurangi	<b>Program pengelolaan sampah kota</b>  - Program bank sampah - Program 3R	Menginternalkan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi sebuah produk.	Pengolahan sampah dengan menggunakan metode pengolahan sampah 3R serta pengolahan pupuk kompos.	-	Dengan meningkatnya jumlah dan timbunan sampah hal ini dapat berdampak pada rusaknya lingkungan. untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya dengan program sampah 3R dan bank sampah. Hal ini diharapkan	- Program pengelolaan sampah - Kegiatan pemanfaatan daur ulang sampah

Aspek Tinjauan	<i>Implementation analysis of solid waste management in Ludhiana city of Punjab</i> (Mir, 2021)	Analisis Sistem Persampahan di Kota Tenate (Akbar, 2014)	Penyusunan Indeks Tingkat Pelayanan Sistem Pengelolaan Sampah Kota (Rumakat, 2021)	Pengelolaan Sampah (Damanhuri, 2010)	Manajemen Program Pengelolaan Sampah di Bening Saguling (Fitriana, 2019)	Evaluasi Pengelolaan Sampah kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu (Tato S. , 2015)	Pembahasan	Tinjauan Peneliti
	jual ekonomi (Bandara, 2011 ).	volume sampah di TPA.					sampah dapat bernilai ekonomi apabila dikelola dengan bijak.	
<b>KEBIJAKAN DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-	Peraturan daerah setempat memacu pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi peraturan</li> <li>- Akses data peraturan</li> <li>- Kebijakan hukum</li> </ul>	Peraturan yang diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertiban umum</li> <li>- Rencana induk</li> <li>- Bentuk lembaga dan organisasi pengelola</li> <li>- Tata-cara penyelenggaraan</li> <li>- Besaran tarif</li> <li>- Kerjasama dengan berbagai pihak terkait</li> </ul>	-	Secara umum beberapa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah nasional maupun regional adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>4) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.</li> <li>5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009</li> </ul>	Kebijakan undang-undang, peraturan daerah serta standar yang berlaku dalam penanganan pengelolaan sampah merupakan suatu acuan dalam perencanaan dan pengimplementasian operasional persampahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang peraturan pengelolaan persampahan</li> <li>- Kebijakan peraturan daerah pengelolaan persampahan</li> <li>- Standar Nasional Indonesia (SNI) sistem pengelolaan persampahan</li> </ul>

Sumber: hasil triangulasi antar peneliti sistem pengelolaan persampahan, 2021

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam laporan seminar prosposal tugas akhir dengan judul “Tinjauan Komprehensif Sistem Pengelolaan Persampahan di Banjarmasin Timur” dalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang mengenai materi penelitian tugas akhir, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup mengenai batasan wilayah dan batasan penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini membahas tentang tinjauan pustaka dari tinjauan teori, tinjauan kebijakan, penelitian terdahulu dan *best practice*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III merupakan pembahasan metode penelitian yang meliputi kerangka piker, metode pengumpulan data, metode analisa, desain survey.